

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kajian Teoritis

2.1.1.1 PDB per kapita

A. Definisi Produk Domestik Bruto

Dalam menilai kondisi perekonomian suatu negara, indikator yang digunakan harus mampu mencerminkan total pendapatan yang diperoleh oleh seluruh pelaku ekonomi. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator yang paling tepat dan akurat untuk mengukur apakah perekonomian suatu negara berjalan dengan baik atau mengalami hambatan (Andini, 2019). Produk Domestik Bruto (PDB) merujuk pada nilai keseluruhan pasar dari berbagai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode tertentu. Dengan kata lain, PDB menggambarkan jumlah total nilai ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas produksi, baik oleh perusahaan maupun individu asing yang menjalankan usaha di dalam wilayah negara tersebut

Selain itu, PDB juga mencerminkan daya beli masyarakat terhadap output produksi. PDB berfungsi sebagai ukuran dari total pengeluaran suatu negara terhadap barang dan jasa yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi, sekaligus sebagai indikator dari total pendapatan masyarakat dalam perekonomian. Karena dalam sistem ekonomi, total pendapatan harus seimbang dengan total pengeluaran, PDB dapat digunakan untuk mengukur kedua aspek tersebut secara bersamaan (Mankiw,

2018). Kenaikan pendapatan akan berbanding lurus dengan peningkatan kemampuan dalam mengembalikan modal (*ability to pay*).

B. Produk Domestik Bruto per kapita

Menurut Sukirno (2013) Pendapatan per kapita merujuk pada rata-rata pemasukan yang diperoleh setiap individu dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai jumlah rata-rata barang dan jasa yang tersedia bagi setiap warga negara dalam periode tertentu. Cara menghitungnya adalah dengan membagi total pendapatan nasional suatu negara dalam satu tahun dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Dengan demikian, PDB per kapita menggambarkan rata-rata penghasilan masyarakat dalam suatu periode waktu tertentu.

2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi membahas berbagai faktor yang memengaruhi peningkatan output per kapita dalam jangka panjang serta bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam membentuk proses pertumbuhan ekonomi.

1. Teori pertumbuhan klasik.

Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Pendekatan ini menyatakan bahwa perkembangan ekonomi ditentukan oleh empat faktor utama, yakni jumlah penduduk, ketersediaan modal, luas wilayah beserta sumber daya alam, serta teknologi yang digunakan. Para ekonom klasik lebih menitikberatkan pengaruh pertumbuhan populasi terhadap

perkembangan ekonomi dengan mengasumsikan bahwa luas lahan, sumber daya alam, dan teknologi tidak mengalami perubahan.

Teori ini juga mencetuskan konsep teori penduduk optimal, Hubungan antara jumlah penduduk dan pendapatan per kapita menunjukkan bahwa pada awalnya, pertumbuhan populasi dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita. Namun, apabila jumlah penduduk terus bertambah, efek dari hukum hasil yang semakin menurun akan mengakibatkan berkurangnya fungsi produksi marginal. Pada titik tertentu, pendapatan per kapita mencapai nilai maksimum, yang disebut sebagai penduduk optimal. Jika jumlah penduduk melampaui titik optimal, pertumbuhan ekonomi akan melambat dan bahkan dapat mengalami penurunan (Sarnowo et al., 2020).

2. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan secara independen namun dalam periode yang hampir bersamaan oleh Harrod (1984) di Inggris dan Domar (1957) di Amerika Serikat. Meskipun keduanya menggunakan metode perhitungan yang berbeda, hasil yang diperoleh tetap serupa, sehingga teori ini kemudian dikenal sebagai teori Harrod-Domar. Teori ini merupakan pengembangan dari pemikiran Keynes, di mana Keynes lebih menitikberatkan analisis dalam jangka pendek (statis), sementara Harrod-Domar lebih berfokus pada analisis dalam jangka panjang (dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi:

- a) Perekonomian bersifat tertutup
- b) *Marginal Propensity to Save* (MPS) atau hasrat menabung bersifat konstan.

- c) Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*)
- d) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja bersifat tetap dan sebanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam jangka panjang (*steady growth*) dapat tercapai apabila kapasitas barang modal dimanfaatkan secara maksimal, tingkat tabungan seimbang dengan pendapatan nasional, rasio modal terhadap output (*Capital Output Ratio/COR*) tetap konstan, serta struktur perekonomian terdiri dari dua sektor utama, yaitu konsumsi (C) dan investasi (I).

2.1.1.3 Investasi Asing Langsung

a. Teori Terkait *Foreign Direct Investment*

Foreign Direct Investment (FDI) atau Investasi asing langsung merupakan bentuk penanaman modal asing, di mana individu atau perusahaan dalam suatu negara berinvestasi di sektor bisnis negara lain. Menurut Mankiw (2018), FDI merujuk pada kepemilikan dan pengelolaan investasi oleh pihak asing. Dalam konteks ini, FDI juga dikenal sebagai Penanaman Modal Asing (PMA). FDI dapat dipahami sebagai arus modal internasional yang memungkinkan perusahaan dari suatu negara untuk mendirikan atau memperluas operasionalnya di negara lain. Menurut Alfaro & Chauvin (2016), FDI memberikan berbagai keuntungan bagi negara penerima. Dari perspektif makroekonomi, FDI berkontribusi dalam membuka sektor ekonomi baru, mendorong perkembangan teknologi, serta mendiversifikasi ekspor. Sedangkan dalam perspektif mikroekonomi, FDI memungkinkan transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta

mendorong investasi dan produktivitas di sektor industri hulu dan hilir melalui interaksi antara perusahaan asing dan domestik.

2.1.1.4 Pengeluaran Pemerintah

Menurut Sadono (2011) mendefinisikan pengeluaran pemerintah sebagai pembelanjaan negara terhadap barang modal, barang konsumsi, serta jasa-jasa. Sementara itu, Puspa (2022) menjelaskan pengeluaran pemerintah merupakan pemanfaatan sumber daya dan dana negara guna membiayai berbagai kegiatan yang mendukung fungsinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mendorong investasi, menjaga stabilitas ekonomi, serta membiayai Pembangunan. Basri (2023) mengelompokkan pengeluaran pemerintah ke dalam beberapa kategori utama, yaitu:

- 1) Pengeluaran untuk investasi
- 2) Pengeluaran yang langsung berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 3) Pengeluaran yang bersifat penghematan.
- 4) Pengeluaran yang bertujuan meningkatkan kesempatan kerja dan memperluas daya beli masyarakat. Menurut Sujidno & Febriani (2023) pengeluaran pemerintah juga berfungsi sebagai alat distribusi daya beli dalam masyarakat melalui mekanisme pembayaran transfer. Pembayaran transfer ini memungkinkan sumber pendapatan tertentu dialokasikan kembali tanpa adanya timbal balik layanan secara langsung. Secara umum, fungsi keuangan pemerintah mencakup tiga aspek utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Basri, 2023).

a. Teori Pengeluaran Pemerintah

Dalam kebijakan fiskal, terdapat beberapa jenis kebijakan anggaran yang umum digunakan, yakni anggaran berimbang, surplus, dan defisit. Anggaran berimbang terjadi ketika jumlah penerimaan negara sama dengan jumlah pengeluaran. Jika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran, maka peningkatan pengeluaran menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan. Pengeluaran ini mencakup belanja rutin, seperti biaya operasional pemerintahan daerah, serta belanja pembangunan yang berfokus pada layanan (Wahyuningrum & Juliprijanto, 2022).

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave menjelaskan keterkaitan antara tingkat belanja pemerintah dengan fase pertumbuhan ekonomi. Tahapan ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Tahap Awal: Pada fase ini, pemerintah melakukan investasi besar dalam infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
2. Tahap Menengah: Investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan PDB per kapita, meskipun investasi swasta mulai berperan lebih besar.
3. Tahap Lanjut: Fokus utama pemerintah beralih dari pembangunan infrastruktur ke pengeluaran sosial, seperti program kesejahteraan masyarakat dan layanan kesehatan (Mangkoesoebroto, 2001).

Menurut Todaro (2000) pengeluaran pemerintah merupakan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas produksi ekonomi guna

meningkatkan pendapatan dan output nasional. Sementara itu, menurut Sukirno, (2003), menegaskan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran pemerintah meliputi pendapatan pajak yang tersedia, tujuan ekonomi yang ingin dicapai, serta pertimbangan stabilitas ekonomi dan keamanan.

Menurut Sujidno & Febriani (2023) & mengidentifikasi beberapa teori utama terkait pengeluaran pemerintah dan PDB per kapita:

1) Teori ini dikembangkan oleh Rostow, Musgrave, dan Adolf Wagner. Model mereka menunjukkan hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan tahapan PDB per kapita. Pada tahap awal, pemerintah perlu mengalokasikan investasi besar untuk sektor publik guna membangun infrastruktur dasar. Seiring pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengeluaran di sektor publik akan berkontribusi terhadap ketersediaan barang publik yang lebih (G. P. Putri, 2019). Menurut Guzali Tafalas (2021) menegaskan bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita berkontribusi pada meningkatnya belanja pemerintah. Hal ini selaras dengan kebijakan yang dirancang untuk mengatur berbagai aspek sosial, termasuk pendidikan, hukum, dan budaya. Perluasan belanja pemerintah juga dipengaruhi oleh pertumbuhan produk domestik bruto (Dumairy, 1997). Sementara itu, Mangkoesoebroto (2001) berpendapat bahwa peningkatan pendapatan negara melalui pajak berkontribusi pada pembiayaan anggaran pemerintah. Hal ini berdampak pada kenaikan GNP, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan serta belanja pemerintah.

2) Teori Pengeluaran Pemerintah secara Mikro Menurut Wahyuningrum & Juliprijanto (2022) teori ini berfokus pada faktor-faktor mikro yang memengaruhi

distribusi anggaran untuk penyediaan barang publik. Dalam hal ini, alokasi pengeluaran ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang publik di suatu negara.

Pengeluaran pemerintah yang diarahkan dengan cermat dan tepat sasaran melalui APBN memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan instrumen keuangan seperti SBN yang bijaksana dan kebijakan fiskal yang tepat akan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Lebih jauh lagi, pengeluaran yang difokuskan pada sektor-sektor produktif dan berkelanjutan akan memberikan dampak positif jangka panjang yang mencakup tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan keberlanjutan lingkungan yang terjaga (Sagita, 2021)

2.1.1.5 Net ekspor

Net ekspor mengacu pada selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Jika terjadi defisit net ekspor secara berkelanjutan, hal ini dapat berdampak negatif terhadap perekonomian. Net ekspor dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Net Ekspor} = (\text{Ekspor} - \text{Impor})$$

1. Ekspor

Menurut Apridar (2009) Ekspor menjadi salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan pemasukan daerah, sehingga memiliki peranan signifikan dalam merancang strategi pembangunan ekonomi. Dengan demikian, setiap perubahan dalam jumlah ekspor dapat secara langsung memengaruhi

pendapatan nasional. Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi ekspor, yaitu:

1. Kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negeri.

Pemerintah dapat meningkatkan aktivitas ekspor dengan memberikan berbagai kemudahan bagi eksportir. Hal ini dapat berupa pengurangan atau penghapusan biaya ekspor, penyediaan fasilitas produksi yang lebih baik, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekspor.

2. Kondisi Pasar Domestik dan Internasional.

Faktor lain yang mempengaruhi ekspor adalah situasi pasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tingkat permintaan dan penawaran menjadi faktor kunci dalam menentukan harga barang. Jika permintaan terhadap suatu barang lebih tinggi dibandingkan pasokannya, harga barang tersebut akan meningkat. Situasi ini mendorong eksportir untuk meningkatkan volume ekspor guna memanfaatkan peluang keuntungan

3. Keahlian Eksportir dalam Menangkap Peluang Pasar

Eksportir memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan ekspor suatu negara. Mereka harus memiliki keterampilan dalam pemasaran dan mampu menemukan peluang pasar yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan daya saing di tingkat global.

2. Impor

Menurut Ricaldo Gultom (2023) impor merupakan kegiatan memperoleh barang dari luar negeri yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah serta menggunakan transaksi dalam mata uang asing. Sebelum diakui sebagai barang impor resmi, barang yang didatangkan harus melewati area pabean negara terkait.

Baik ekspor maupun impor memiliki manfaat masing-masing.

Tiga manfaat utama dari impor adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi secara lokal.
2. Memperoleh teknologi modern.
3. Memenuhi kebutuhan bahan baku industri.

Jika nilai ekspor dan impor suatu negara seimbang, maka kondisi ini disebut trade balance. Apabila ekspor melebihi impor, negara akan memperoleh surplus devisa yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Net ekspor merupakan aspek penting dalam menilai aktivitas ekspor dan impor suatu negara. Terdapat beberapa teori utama yang membahas konsep net ekspor, antara lain:

1) Teori Pendekatan Elastisitas

Teori ini menitikberatkan pada analisis aktivitas ekspor dan impor dalam konteks neraca pembayaran. Pendekatan ini melihat net ekspor sebagai selisih antara ekspor dan impor, serta menyoroti dampak perubahan nilai tukar terhadap keseimbangan perdagangan. Salah satu konsep utama dalam pendekatan ini adalah Kondisi Marshall-Lerner menyatakan bahwa keseimbangan di pasar valuta asing ditentukan oleh elastisitas harga ekspor dan impor. Apabila total elastisitasnya melebihi satu, maka fluktuasi nilai tukar akan berpengaruh secara signifikan terhadap neraca ekspor bersih.

2) Teori Marshall-Lerner Condition

Dalam teori ini, peningkatan ekspor dan penurunan impor belum tentu berdampak langsung pada peningkatan net ekspor. Net ekspor hanya akan meningkat ketika

nilai tukar riil mengalami depresiasi, asalkan persyaratan dalam kondisi Marshall-Lerner terpenuhi. Jika jumlah elastisitas harga permintaan impor dan ekspor secara absolut lebih besar dari satu, maka pasar valuta asing dikatakan stabil. Sebaliknya, jika kurang dari satu, pasar dinyatakan tidak stabil. Jika elastisitasnya tepat satu, maka perubahan nilai tukar tidak mempengaruhi net ekspor.

3) Teori Pendekatan Intemporal

Pada awalnya, net ekspor dihitung sebagai selisih antara ekspor dan impor. Dalam jangka panjang, harga relatif antara dalam negeri dan luar negeri menjadi faktor utama yang menentukan keseimbangan perdagangan. Pendekatan elastisitas perdagangan berguna untuk membuat prediksi jangka pendek mengenai dampak nilai tukar terhadap net ekspor, tetapi memiliki keterbatasan dalam menjelaskan hubungan jangka panjang serta keseimbangan perdagangan (Noni Darmawati, 2021)

2.1.1.6 Indeks Persepsi Korupsi

a) Pengertian Korupsi

Korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan subordinasi kepentingan publik demi keuntungan pribadi, yang mencakup pelanggaran norma, tugas, serta kesejahteraan umum. Korupsi dilakukan secara tersembunyi melalui praktik penipuan, pengkhianatan, dan mengabaikan dampak negatif bagi masyarakat, menurut Ningsih Kristia (2021). *Black's Law Dictionary* menjelaskan, korupsi juga diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ilegal dengan menyalahgunakan hak orang lain.

Korupsi terjadi ketika individu menyalahgunakan wewenang atau posisinya

demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dengan cara yang melanggar hak serta kewajiban pihak lain (Black's Law Dictionary). Tindakan koruptif seperti suap dan praktik politik uang merupakan fenomena yang umum dijumpai. Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan bagaimana korupsi bisa terjadi:

1. Teori Means – Ends Scheme Robert, Teori ini menyatakan bahwa korupsi muncul sebagai akibat dari tekanan sosial yang mendorong individu untuk melanggar norma-norma yang ada.
2. Teori Vroom, Menurut teori ini, korupsi terjadi karena seseorang memiliki ekspektasi tertentu yang ingin dicapai. Motivasi seseorang untuk bertindak dipengaruhi oleh harapan dan nilai yang dimilikinya.
3. Teori Robert Kitgaard, Teori ini menyebutkan bahwa korupsi terjadi ketika terdapat monopoli kekuasaan (*monopoly of power*), ditambah dengan keleluasaan tanpa pengawasan (*discretion of official*), dan kurangnya akuntabilitas (*minus accountability*). Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan peluang besar bagi tindakan korupsi.
4. Teori Gone, teori ini dikemukakan oleh Jack Bologne. Menurut Alif (2024) ini menjelaskan bahwa korupsi dipicu oleh empat faktor utama, yaitu *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), dan *Exposure* (pengungkapan).

b) Mengukur Korupsi

Untuk mengukur tingkat korupsi, perlu adanya pemahaman yang jelas mengenai definisi korupsi itu sendiri. Menurut Bank Dunia, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Definisi ini mencakup tidak

hanya sektor publik, tetapi juga sektor swasta. Namun, korupsi politik dan penyuapan di sektor swasta memiliki karakteristik yang berbeda. Mendapatkan informasi terkait korupsi merupakan hal yang sangat sulit karena:

- a. Korupsi dilakukan secara tertutup dan bertentangan dengan hukum.
- b. Setiap negara memiliki definisi korupsi yang berbeda. Di beberapa negara, memberikan hadiah kepada pejabat publik sudah dianggap sebagai tindakan korupsi. Meskipun sulit untuk mengukur korupsi secara langsung, sering kali kita dapat mengenalinya saat melihatnya. Oleh karena itu, dalam berbagai penelitian, ukuran korupsi biasanya didasarkan pada persepsi masyarakat terhadap korupsi (*perception of corruption*) menurut Fajar & Azhar (2018).

Berdasarkan Transparency International, IPK merupakan indikator yang mengukur persepsi korupsi sektor publik dalam skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). IPK dihitung berdasarkan kombinasi 13 survei global dan penilaian para ahli, menurut Haqmi (2019).

Christoph Stückelberger, seorang ahli etika terkemuka, membahas ciri-ciri dan motif korupsi dalam karyanya yang berjudul "*Corruption-Free Churches are Possible*" mengemukakan ada 3 ciri-ciri korupsi sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Kekuasaan: Korupsi terjadi ketika individu menggunakan posisi atau kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi, mengabaikan tanggung jawab etis dan profesional.
2. Tindakan Tersembunyi: Praktik korupsi sering dilakukan secara rahasia untuk menghindari deteksi dan konsekuensi hukum.

3. Pengkhianatan Kepercayaan: Korupsi melibatkan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau institusi kepada individu dalam posisi tertentu, menurut Ayni Putri Silalahi (2024).

2.1.2 Kajian Empiris

Kajian empiris adalah sebuah proses yang diperlukan dalam membangun kerangka pemikiran, hal ini bertujuan agar kerangka pemikiran memiliki dasar yang kuat. Mencari penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian merupakan salah satu proses dalam membangun kerangka berpikir. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian:

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

NO	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(Gunawan et al., 2024) Pengaruh <i>Foreign Direct Investment</i> dan Perdagangan Internasional Terhadap Produk Domestik Bruto di ASEAN	- <i>Foreign Direct Investment</i>	Perdagangan Internasional	<i>Foreign Direct Investment</i> dan Ekspor Memiliki Hubungan Positif Yang Signifikan Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Dan PDB per kapita Di ASEAN	Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 13, 1 (Juni, 2024)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	(Asrinda & Setiawati, 2022) Pengaruh Investasi Asing, Ekspor Neto dan Tenaga Kerja Terhadap PDB per kapita	Pengaruh Investasi Asing Langsung	Ekspor Neto dan Tenaga Kerja di Indonesia	Penanaman Modal Asing (X1) Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap PDB per kapita (Y) di Indonesia	Equilibrium Volume 11. No. 2. Tahun 2022 Hal 50-58
3	(Kambono, 2020) Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap PDB per kapita Indonesia	Pengaruh Investasi Asing	Investasi Dalam Negeri di Indonesia	Investasi Asing Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap PDB per kapita di Indonesia	Jurnal Akuntansi Jil. Volume 12 Nomor 1 Bahasa Indonesia: Mei 2020:137-145
4	(Mawardi et al., 2023) Pengaruh Investasi Asing Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan PDB per kapita Indonesia	Pengaruh Investasi Asing Langsung, PDB per kapita Indonesia	Pemberdayaan Masyarakat	Investasi Asing Juga Telah Memberikan Dampak Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Pada Tahun 2022, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mencapai 5,01%. PDB per kapita Ini Salah Satunya Disebabkan Oleh Peningkatan Investasi Asing.	Jurnal Ilmu Pendidikan Pkn dan Sosial Budaya, Volume 7 No.2 December 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	(Mai, N., Duy, D., & Phuong, 2023) Dampak Investasi Asing Langsung Terhadap PDB per kapita Di Vietnam	Investasi Asing Langsung, PDB per kapita	PDB per kapita di Vietnam	Variabel FDI Memiliki Dampak Positif Pada PDB per kapita Dalam Jangka Pendek Dan Panjang.	Jurnal Sains Dan Teknologi: Edisi Khusus Ekonomi - Hukum - Ilmu Manajemen 2023, 7(3):4658-4
6	(Ichvani & Sasana, 2019) Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap PDB per kapita Di Asean 5	Pengeluaran Pemerintah	Konsumsi, dan Keterbukaan	Pengeluaran Pemerintah Memiliki Pengaruh Positif dan Signifikan Terhadap PDB per kapita Dengan Nilai Probablita $0.0000 < 0.05$. Setiap Kenaikan Pengeluaran Pemerintah Sebesar 1 Persen Akan Meningkatkan PDB per kapita Sebesar 0.129 Persen	Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Volume 4 Nomor 1 2019
7	(Firman, 2021) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran Terhadap PDB per kapita Di Negara Asean 5	Pengeluaran Pemerintah	Pengangguran	Dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap PDB per kapita Negara ASEAN 5	Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP) Volume 6, Nomor 2. Tahun 2021 Page: 143 - 152 Http://Ojs.Uho.Ac.Id/Index.Php/JPEP

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	(Muliana & Saputra, 2023) <i>Analyzing The Effect Of Government Spending on Economic Growth In Riau Province, Indonesia</i>	Pengeluaran Pemerintah	Objek Penelitian Di Riau	Pengeluaran Pemerintah Pada PDB per kapita di Provinsi Riau Berpengaruh Positif Signifikan.	<i>Global Journal Of Business, Economics & Social Development 1 (1) May 2023, Pp.23-30</i>
9	(Kaharudin et al., 2019) <i>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDB per kapita, Pengangguran dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017)</i>	Pengeluaran Pemerintah	Pengangguran dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado)	Variabel Belanja Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal Ini Ditunjukkan oleh Koefisien Regresi Jumlah Pertumbuhan Ekonomi Yaitu Sebesar 0,07. Jika Belanja Pemerintah Meningkat Sebesar 1% Maka Pertumbuhan Ekonomi Akan Meningkat Sebesar 0,07 %	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 19 No. 04 Tahun 2019
10	(Blavasciunait e et al., 2020) <i>Trade Balance Effects On Economic Growth: Evidence From European Union Countries</i>	Net ekspor	Objek Penelitian di Eropa	Memburuknya Net ekspor Berdampak Negatif Pada PDB per kapita Di Negara-Negara Uni Eropa, Terlepas Apakah Itu Dimulai Dari Defisit Perdagangan	<i>Mdpieconomies 2020 , 8 (3), 54; Https://Doi.Org/10.3390/Economies8030054</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	(Tellaeche, 2022a) <i>A Mercant Il Ist Appro Ach To The Chinese Economic</i>	Net ekspor	Objek Penelitian di Tiongkok	Dampak Positif Net ekspor Terhadap PDB per kapita di Tiongkok Lebih Terkait Dengan Peningkatan Investasi Nasional, Bukan Pada Daya Tarik Investasi Asing Langsung.	<i>Razon Critica Num.13(20 20)</i>
12	(Le et al., 2019) <i>How Do Trade Policies Affect Economic Growth</i>	Perdagangan Bebas, Keterbukaan Perdagangan		Kebijakan Perdagangan, PDB per kapita	Jurnal Internasional Penelitian dan Manajemen Ilmiah Lanjutan, Volume 4, Edisi 1, Januari 2019
13	(Ichvani & Sasana, 2019) <i>Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap PDB per kapita di Asean 5</i>	Indeks Persepsi Korupsi	Konsumsi, dan Keterbukaan	Indeks Persepsi Korupsi Berpengaruh Positif Terhadap PDB per kapita. Hasil Estimasi Menunjukkan Bahwa Setiap Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Sebesar 1 Akan Meningkatkan PDB per kapita Sebesar 0.072 Persen.	Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Volume 4 Nomor 1 2019
14	(Ningsih et al., 2021) <i>Analisis Pengaruh</i>	Indeks Persepsi Korupsi	Inflasi, Investasi	Dalam Penelitian Ini Menemukan Hasil Yang Positif	Directory Journal of Economic

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Inflasi, investasi Indeks Persepsi Korupsi Terhadap PDB per kapita Indonesia Tahun 1999- 2019			dan Signifikan, Maknanya PDB per kapita Meningkat 1.579 Setiap Kenaikan Angka Indeks dan Itu Menunjukkan Kondisi Korupsi di Indonesia Berangsur- Angsur Teratasi	Volume 3 Nomor 2
15	(Spyromitros & Panagiotidis, 2022) <i>The Impact Of Corruption On Economic Growth In Developing Countries And A Comparative Analysis Of Corruption Measurement Indicators</i>	Indeks Persepsi Korupsi	Objek Penelitian di Amerika Latin	Hasil Empiris Penelitian Menunjukkan Bahwa korupsi Menghambat PDB per kapita Negara-Negara Berkembang.Ting kat Korupsi Mempengaruhi PDB per kapita di Berbagai Wilayah; Khususnya di Amerika Latin	Spyromitros Dan Panagiotidis , Ekonomi & Keuangan Yang Cogent (2022), 10: 2129368htt ps://Doi.Or g/10.1080/2 3322039.20 22.2129368

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Investasi Asing Langsung dengan PDB per kapita

Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI) adalah bentuk penanaman modal asing di mana individu atau perusahaan dari suatu negara melakukan investasi dalam dunia usaha di negara lain. (Mankiw, 2018).

Menurut Teori PDB Per Kapita Baru (*New Growth Theory*) atau yang dikenal sebagai Teori Pertumbuhan Endogen (*Endogenous Growth Theory*), FDI memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan PDB per kapita. Penelitian telah membuktikan bahwa FDI mampu menciptakan peluang kerja baru serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pengalaman kerja, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan per kapita, menurut (Putra, 2022). Selain itu, hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa FDI memiliki hubungan positif yang signifikan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDB per kapita di kawasan ASEAN (Gunawan, 2024). Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah peran FDI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, pajak, serta menyediakan lapangan kerja baru. Studi lain yang dilakukan dengan metode cross-section dan time-series juga menegaskan bahwa investasi asing langsung berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PDB per kapita (Sirajjudin, 2017).

Selanjutnya berdasarkan penelitian Putri & Heriberta (2018) Foreign direct investment (FDI) sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Koefisien regresi foreign direct investment (FDI) sebesar 0,00000502 menunjukkan bahwa jika variabel FDI meningkat sebesar 1 juta US\$, pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,00000502 persen. Nilai probabilitasnya adalah 0.0054, atau 5%. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen yang diteliti oleh Hakizimana (2021) mengenai hubungan yang kuat dan menguntungkan antara investasi asing

langsung (FDI) dan PDB per kapita Rwanda. Hubungan ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Arus masuk modal asing langsung telah meningkatkan PDB per kapita. Ini disebabkan oleh reformasi yang dilakukan pemerintah Rwanda untuk menjadikan negara ini tempat yang menguntungkan bagi investasi dengan memberikan stabilitas lingkungan politik dan makroekonomi.

Secara keseluruhan, berbagai penelitian ini menunjukkan konsistensi bahwa FDI memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap PDB per kapita, sejalan dengan konsep dasar dalam teori pertumbuhan endogen, yang menganggap investasi, termasuk FDI, sebagai faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang

2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan PDB per kapita

Menurut Sadono (2011) Pengeluaran pemerintah adalah perbelanjaan pemerintah terhadap barang-barang modal, barang konsumsi dan ke atas jasa-jasa.

Sedangkan Firman (2021) menjelaskan hasil analisis menggunakan metode panel ARDL menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pengeluaran pemerintah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap PDB per kapita. Peningkatan pengeluaran pemerintah cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dana yang dialokasikan sering kali digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai program lain yang mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Pendapat serupa juga

dikemukakan oleh Sagita (2021) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan keterbukaan perdagangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB per kapita. Sementara itu, Wahyudi (2020) menambahkan bahwa dampak pengeluaran pemerintah terhadap PDB per kapita cukup kuat dalam jangka pendek, tetapi tidak begitu berpengaruh dalam jangka menengah. Selanjutnya penelitian dari Fahrudin (2021) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah meningkatkan PDB per kapita Indonesia, ini karena pengeluaran pemerintah membiayai seluruh kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan kegiatan perekonomian yang mengalami peningkatan. Akibatnya, semakin banyak pengeluaran pemerintah semakin tinggi PDB per kapita Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini selaras dengan Holt (2012) yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah negara bagian memiliki efek positif dan signifikan secara statistik terhadap PDB per kapita.

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun dampaknya dapat bervariasi tergantung pada jangka waktu yang dianalisis. Oleh karena itu, kebijakan pengeluaran negara perlu dirancang secara hati-hati dengan mempertimbangkan faktor ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang.

2.2.3 Hubungan Net ekspor dengan PDB per kapita

Menurut Mankiw (2018) net ekspor merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Ketika nilai ekspor melebihi impor, maka net ekspor bersifat positif atau terjadi surplus dalam neraca perdagangan. Sebaliknya, jika nilai impor lebih besar dibandingkan ekspor, net ekspor menjadi negatif (defisit neraca perdagangan) (Asrinda & Setiawati, 2022).

Menurut Andreansyah (2023) variabel net ekspor terdapat pengaruh positif dan signifikan, Jika negara mengalami surplus dalam neraca perdagangan (net ekspor positif), maka ada lebih banyak pendapatan yang dihasilkan dari luar negeri yang bisa digunakan untuk konsumsi domestik atau investasi. Jika surplus ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan investasi dalam sektor-sektor domestik, maka PDB per kapita bisa tumbuh. Selanjutnya menurut Purnama & Yao (2019) Net ekspor dan investasi asing langsung memiliki dampak positif signifikan jangka panjang terhadap PDB per kapita. Selanjutnya penelitian dari Devitasari (2023) menjelaskan bahwa PDB per kapita dipengaruhi oleh net ekspor, yang terdiri dari aktivitas ekspor dan impor. Ini sejalan dengan teori Heckscher-Ohlin, yang menyatakan bahwa perbedaan dalam komponen pendukung mempengaruhi perdagangan internasional. Model ini memprediksi apakah negara akan mengimpor barang dengan faktor langka untuk pemenuhan kebutuhan dan mengekspor barang yang dapat digunakan secara terus menerus.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbaikan dalam net ekspor dapat berdampak positif pada PDB per kapita melalui peningkatan pendapatan nasional dan produktivitas ekonomi, baik secara langsung maupun dengan adanya dukungan investasi asing yang masuk

2.2.4 Hubungan Indeks Persepsi Korupsi dengan PDB per kapita

Korupsi dapat didefinisikan sebagai subordinasi kepentingan umum demi keuntungan pribadi, yang mencakup pelanggaran norma, tanggung jawab, dan kesejahteraan masyarakat. Tindakan ini sering dilakukan secara rahasia melalui pengkhianatan, penipuan, serta tanpa memedulikan dampak negatifnya terhadap rakyat (Ningsih et al., 2021).

Hubungan antara Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan PDB per kapita umumnya menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah (IPK yang lebih tinggi) cenderung memiliki PDB per kapita yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya investasi, pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Sebaliknya, negara dengan tingkat korupsi yang tinggi sering kali mengalami hambatan dalam pertumbuhan ekonomi dan memiliki PDB per kapita yang lebih rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih et al (2021) hasil analisis regresi mengindikasikan bahwa Indeks Persepsi Korupsi berpengaruh signifikan terhadap PDB per kapita di Indonesia sepanjang periode 1999-2019, dengan nilai probabilitas 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan adanya hubungan signifikan antara IPK dan PDB per kapita,

sehingga hipotesis tersebut dapat diterima. Selain itu, koefisien sebesar 1.579 yang bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah, yakni peningkatan IPK berbanding lurus dengan kenaikan PDB per kapita. Selanjutnya penelitian Fitri (2024) menjelaskan bahwa peningkatan log PDB per kapita sebesar 0,010811 akan disebabkan oleh peningkatan indeks persepsi korupsi sebesar 1 satuan. Menurut hasil regresi data panel, pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi sejalan dengan teori *san of the wheels*, karena peningkatan indeks menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah.

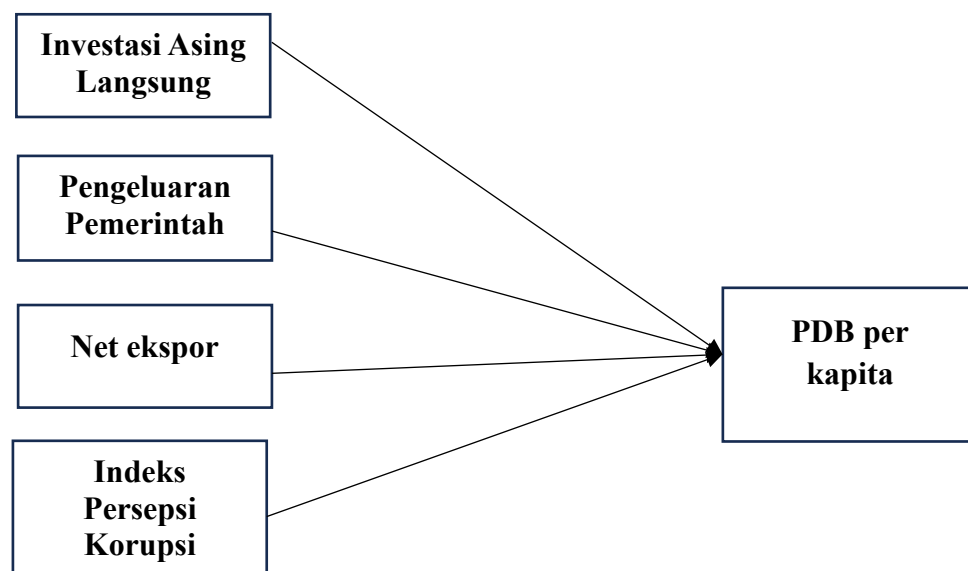
Penelitian selanjutnya oleh Ichvani & Sasana (2019) juga menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi berdampak positif terhadap PDB per kapita di lima negara ASEAN. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Darmawati (2021) Ditemukan bahwa Indeks Persepsi Korupsi, Foreign Direct Investment (FDI), neraca perdagangan, tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB per kapita di lima negara ASEAN selama periode 2009-2018. Menariknya, indikator positif pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa negara dengan perekonomian lebih lemah cenderung mengalami perkembangan lebih cepat dibandingkan negara yang sudah maju.

Hasil penelitian-penelitian tersebut mendukung adanya hubungan positif antara indeks persepsi korupsi dan PDB per kapita, serta menunjukkan pentingnya perbaikan persepsi korupsi dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan yang

menyarankan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, perlu adanya upaya serius dalam pemberantasan korupsi serta peningkatan transparansi di sektor publik.

Secara sistematis kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang diajukan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Pertanyaan tersebut disusun berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga bahwa secara parsial, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, net ekspor, dan indeks persepsi korupsi memiliki pengaruh

positif terhadap PDB per kapita di negara-negara ASEAN pada periode 2010–2023.

2. Diduga bahwa secara simultan, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, net ekspor, dan indeks persepsi korupsi berpengaruh terhadap PDB per kapita di negara-negara ASEAN pada periode 2010–2023.